

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir telah disertai dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif, hal ini menjadi peluang besar bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang dinamis, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai aspek. Pembangunan ekonomi maupun pembangunan dalam bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan. Jumlah penduduk di suatu negara menjadi unsur utama dalam pembangunan. Arsyad (2010) menyebutkan pembangunan ekonomi memiliki tiga tujuan inti yaitu meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Ketenagakerjaan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup bidang ekonomi dan sosial, serta merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Sebagai salah satu komponen produksi, tenaga kerja berperan mengendalikan dan mengelola sistem ekonomi, dan memengaruhi kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan investasi (Prasetya, 2021).

Tenaga kerja adalah bagian dari sumber daya manusia dan merupakan salah satu faktor produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, tenaga kerja memiliki peran yang penting untuk menciptakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan produksi, karena tanpa tenaga kerja proses produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Menurut Ganie (2017) tenaga kerja adalah kendaraan yang akan menjadi pendorong pembangunan ekonomi karena merupakan faktor yang paling utama dalam proses produksi. Beberapa riset tentang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di berbagai negara barat menunjukkan bahwa yang menjadi sumber utama dalam kemajuan ekonomi di negara maju bukanlah pertumbuhan modal fisik melainkan modal manusia. Selain faktor utama dalam produksi, tenaga kerja dalam jumlah besar juga bisa menjadi penghambat pembangunan nasional. Terdapat permasalahan mengenai ketenagakerjaan yang umumnya terjadi di negara berkembang yaitu masalah penyediaan lapangan pekerjaan. Zahroh et al., (2021) persoalan ketenagakerjaan yang sebenarnya bukan sekedar kuantitas tenaga kerja saja, namun persoalan yang sebenarnya adalah bagaimana perekonomian dapat memberikan kesempatan kerja yang berkualitas, mampu memberikan harapan dan optimisme bagi tenaga kerja yang terserap dan bekerja di sektor tersebut. Terbatasnya permintaan tenaga kerja dan berkurangnya lapangan kerja akan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan mengurangi tenaga kerja.

Menurut Franita (2019) masalah ketenagakerjaan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh sedikitnya lapangan pekerjaan yang berbanding terbalik dengan besarnya pencari kerja. Dalam hal ini penyerapan tenaga kerja berperan penting karena merupakan suatu indikator utama dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi

suatu negara. Todaro (2011) menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja yaitu jumlah tenaga kerja yang diterima untuk dapat mengerjakan tugasnya dan menggambarkan lapangan kerja tersedia yang kemudian akan diisi oleh para pencari kerja. Jumlah angkatan kerja yang bekerja dapat disebut penyerapan tenaga kerja, dapat digambarkan dengan jumlah tenaga kerja dalam jiwa dan persentase. Pada pengukuran persentase tidak selalu mengalami kenaikan (Haydarsyah 2024). Berikut merupakan jumlah tenaga kerja dan persentase penyerapan tenaga kerja tahun 2023 dari lima pulau di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja (Juta Jiwa) dan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja di 5 Pulau Indonesia Tahun 2023

PULAU	TENAGA KERJA (JUTA JIWA)	PENYERAPAN TENAGA KERJA (%)
Jawa	78	94,13
Sumatera	29	95,02
Sulawesi	10	96,35
Kalimantan	8	95,44
Papua	3	95,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, Haydarsyah 2024 (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah tenaga kerja tertinggi dibanding pulau lainnya dengan angka 78 juta jiwa. Diurutan kedua ada Pulau Sumatera dengan angka 29 juta jiwa, ketiga Pulau Sulawesi dengan angka 10 juta jiwa, keempat Pulau Kalimantan 8 juta jiwa, dan kelima Pulau Papua dengan angka 3 juta jiwa. Namun, jika dilihat dari persentase penyerapan tenaga kerja Pulau Jawa merupakan yang paling rendah, yaitu 94,13% sedangkan pulau dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah Pulau Sulawesi yaitu 96,35%. Dengan demikian, pulau Jawa sebagai pulau dengan total tenaga kerja yang besar tetapi persentase penyerapan tenaga kerja rendah dibanding pulau-pulau lainnya tentu

menjadi sebuah permasalahan. Pada satu sisi dengan tingginya pasokan tenaga kerja dan disisi lain dengan lambannya penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi hampir semua perekonomian negara yang sedang berkembang (Todaro, 1997). Dalam penelitian (Haydarsyah et al. 2024) persentase penyerapan tenaga kerja ini tidak selalu naik tiap tahunnya, penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa pada tahun 2018 sebesar 94,15% lalu 2019 meningkat menjadi 94,31%. Pada 2020 terjadi penurunan menjadi 91,84% dampak dari Pandemi Covid19. Meningkat lagi pada 2021 menjadi 92,74% lalu menjadi 93,54% pada 2022, selanjutnya menjadi 94,13% pada 2023. Berikut merupakan persentase penduduk bekerja di Pulau Jawa.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Bekerja, Angkatan Kerja, dan Persentase Penduduk Bekerja di Pulau Jawa Tahun 2023

PROVINSI	BEKERJA (JUTA JIWA)	ANGKATAN KERJA (JUTA JIWA)	PERSENTASE
DKI Jakarta	5.072.737	5.427.233	93.47
Jawa Barat	23.503.598	25.391.885	92.56
Jawa Tengah	19.988.875	21.069.135	94.87
D I Y	2.139.710	2.221.694	96.31
Jawa Timur	22.703.177	23.868.764	95.12
Banten	5.516.656	5.965.088	92.48

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa menurut data BPS Indonesia, persentase penduduk bekerja di Pulau Jawa Tahun 2023, persentase tertinggi yaitu DIY dengan persentase 96.31 dimana dari 2.221.694 yang terserap 2.139.710 orang. Sedangkan tiga provinsi terendah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan sedikit perbedaan persentase yaitu 93.47 persen, 92.56 persen dan 92.48 persen. Hal ini terjadi karena banyaknya kaum urban yang mencari pekerjaan di sektor industri

olahan manufaktur. Dimana sektor ini menarik banyak pendatang yang tidak sesuai dengan keterampilan. Selain itu, karena tingginya upah minimum yang membuat perusahaan menurunkan jumlah tenaga kerjanya (Wilda, 2022).

Dengan demikian, bahwa jumlah perbandingan angkatan kerja yang bekerja dengan total angkatan kerja secara keseluruhan mengalami ketidakpastian yang menunjukkan kemampuan ekonomi dari penawaran (supply) tenaga kerja meningkat sedangkan dari sisi permintaan (demand) mengalami ketidakpastian yaitu terkadang naik dan terkadang turun. Penyerapan tenaga kerja harus ditingkatkan untuk menyamai kecepatan pertumbuhan populasi usia belia yang memasuki pasar tenaga kerja (Lokiman et al., 2014).

Penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja termasuk tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal (teknologi), dan pengeluaran non-upah lainnya. Faktor eksternal yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan tingkat bunga (Handoko, 2014).

Upah menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Upah minimum juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidup, atau "gaji hidup", (Wasila 2019) yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidup. Berikut merupakan Upah Minimum Provinsi (UMP) pulau Jawa.

**Tabel 1.3 Upah Minimum Provinsi (UMP)
Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)**

UMP PULAU JAWA TAHUN 2019-2023						
TAHUN	DKI JAKARTA	JABAR	JATENG	DIY	JATIM	BANTEN
2019	3.940,9	1.668,3	1.605	1.570,9	1.630	2.267,9
2020	4.276	1.810	1.742	1.704,6	1.768,7	2.460,9
2021	4.416	1.810	1.798,9	1.765	1.868,7	2.460,9
2022	4.573,8	1.841	1.813	1.840,9	1.891,5	2.501
2023	4.901,7	1.986,6	1.958	1.981,7	2.040	2.661

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat upah minimum tertinggi diantara provinsi lainnya, yaitu pada 2019 sebesar 3.940,9 juta rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 4.901,7 juta rupiah, sedangkan Provinsi DI Yogyakarta memiliki upah minimum terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 1.507,9 juta rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 1.981,7 juta rupiah. Tabel 1.3 juga menunjukkan bahwa UMP di 6 Provinsi Pulau Jawa setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan jumlah tenaga kerja pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Ini berarti peningkatan upah minimum tidak selalu dibarengi dengan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja (Febrianty et al. 2021).

Upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena kenaikan upah mengakibatkan kenaikan biaya produksi barang dan jasa. Akibatnya, perusahaan harus menaikkan harga barang dan jasa tersebut tetapi permintaan akan menurun, yang mengakibatkan penurunan produksi. Sejalan dengan penelitian Faiztsani (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan pada upah minimum dapat memberikan dampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

Sejalan dengan yang dikatakan Handoko (2014) faktor eksternal penyerapan tenaga kerja yaitu pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi daerah yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. PDRB dapat memengaruhi jumlah tenaga kerja dengan asumsi bahwa jika PDRB meningkat, maka nilai output di suatu wilayah akan meningkat. Semakin banyak output atau penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, lebih sulit bagi perusahaan untuk menambah tenaga kerja untuk mengimbangi peningkatan output atau penjualan. Berikut merupakan data PDRB Pulau Jawa 2019-2023.

Tabel 1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

PDRB PULAU JAWA 2019-2023						
TAHUN	DKI	JABAR	JATENG	DIY	JATIM	BANTEN
2019	1.836	1.490	991	1.044	1.649	456
2020	1.792	1.453	965	1.016	1.611	441
2021	1.856	1.507	997	1.073	1.668	460
2022	1.953	1.589	1.050	1.129	1.757	484
2023	2.050	1.669	1.102	1.184	1.844	507

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Tabel 1.4 menunjukkan setiap tahunnya PDRB cenderung mengalami peningkatan. Namun pada 2020 terjadi penurunan yang diakibatkan oleh COVID-19. Provinsi dengan PDRB tertinggi berada di DKI Jakarta yaitu pada 2019 sebesar 1.836 miliar rupiah dan pada 2023 sebesar 2.050 miliar rupiah, sedangkan Provinsi dengan PDRB terendah berada di DI Yogyakarta yaitu pada 2019 sebesar 1.044 miliar rupiah dan pada 2023 sebesar 1.184 miliar rupiah.

Nilai PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, penelitian yang dilakukan oleh Wilda (2020) dan Maryati et al. (2021) yang

menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, karena PDRB menandakan adanya kenaikan pertumbuhan di suatu daerah.

Upaya peningkatan lapangan kerja tentunya tidak terlepas dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (BPS, 2022). Keberhasilan pembangunan tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga harus meningkatkan kualitas manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran yang menyeluruh tentang tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai hasil dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah, kegiatan pembangunan manusia harus menyeluruh dan mencakup semua lapisan masyarakat. Berikut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pulau Jawa Tahun 2019-2023.

**Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (Persen)**

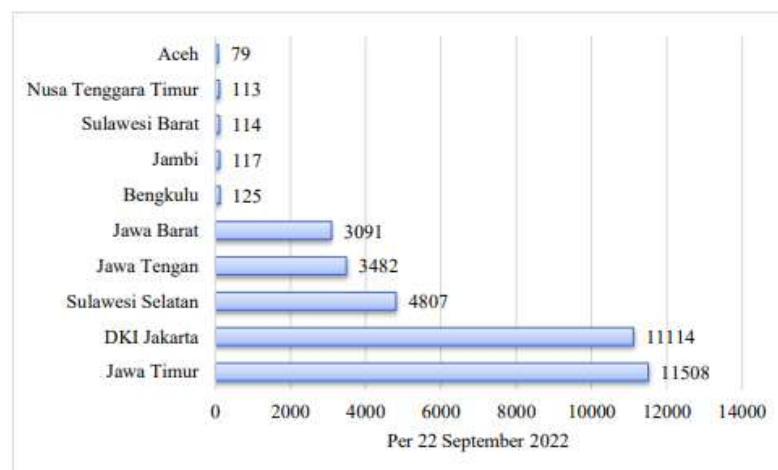
IPM PULAU JAWA (PERSEN)						
TAHUN	DKI	JABAR	JATENG	DIY	JATIM	BANTEN
2019	80.76	72.03	71.73	79.99	71.5	72.44
2020	80.77	72.09	71.73	79.97	71.71	72.45
2021	81.11	72.45	72.16	80.22	72.14	72.72
2022	81.65	73.12	72.79	80.64	72.75	73.32
2023	82.46	73.74	73.87	81.07	74,39	73.87

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Tabel 1.5 menunjukkan IPM tiap provinsi selalu mengalami perubahan. IPM tertinggi berada di DKI Jakarta yaitu pada 2019 sebesar 80.76 persen dan pada 2023 sebesar 82.46. IPM terendah berada di Jawa Tengah yaitu pada tahun 2019 sebesar 71.73 persen dan pada 2023 sebesar 73.87 persen. Terjadi kenaikan IPM pada 2021

dimana tahun tersebut menjadi tahun peralihan dari masa pandemi. Kenaikan IPM ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan, dan daya beli masyarakat. IPM berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, ini sejalan dengan penelitian Wilda (2022) dan Sejahtera (2023) hal ini menunjukkan bahwa ketika IPM mengalami peningkatan maka akan meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja. Ketika IPM naik artinya kualitas pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat semakin membaik.

Berdasarkan faktor-faktor yang sudah di paparkan, masing-masing faktor mengalami penurunan pada 2020. Hal tersebut kemungkinan karena terjadinya pandemi COVID-19. Dimana pada saat itu, *Coronavirus Disease 2019* melanda semua dunia tak terkecuali Indonesia. Berikut data kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia. Berikut data kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia.



Sumber: Dashboard Covid-19 (kemkes.go.id)

Gambar 1.1 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia

Dari gambar 1.1, terdapat 4 Provinsi Pulau Jawa masuk ke daerah yang terkonfirmasi Covid-19 dengan angka yang tinggi. Jawa Timur dan DKI Jakarta menjadi tertinggi karena di Provinsi tersebut padat penduduk dan menjadi akses

keluar masuknya turis ke dalam negeri. Pandemi COVID-19, yang dimulai pada tahun 2019, telah mengubah lanskap ekonomi dan sosial secara global. Gorahe et al. (2021) menjelaskan pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran 0,4-2,3% menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5%. Indonesia tidak luput dari dampaknya, termasuk penurunan ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan ketidakpastian ekonomi.

Kasus terkonfirmasi positif masih berlangsung pada 2023. Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19 melaporkan adanya 944 kasus terkonfirmasi positif. Berdasarkan angka tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan catatan peningkatan kasus tertinggi, dengan total penambahan 373 kasus. Kemudian diikuti Jawa Barat dengan 198 kasus, Banten 101 kasus, Jawa Timur 101, serta Jawa Tengah dengan total 54 kasus konfirmasi baru. Berdasarkan data kementerian kesehatan per 6 Desember 2023, rata-rata kasus harian Covid-19 bertambah sebanyak 35-40 kasus. Sementara, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit tercatat antara 60-131 orang. Dengan tingkat keterisian rumah sakit sebesar 0.06% dan angka kematian 0-3 kasus per hari.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, secara umum penyerapan tenaga kerja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika melihat persentase penyerapan tenaga kerja tidak selalu naik tiap tahunnya. Peneliti tertarik untuk

mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhinya, dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya serta menambahkan variabel lain. Variabel yang baru dalam penelitian ini (research gap), yaitu variabel Covid-19 yang masih jarang diteliti pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja. Tentunya akan ada perubahan dan perbedaan pada sebelum dan setelah adanya Covid-19. Perekonomian Indonesia masih dalam masa peralihan pasca pandemi dan juga karena Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia. Sehingga peneliti dapat memberikan judul penelitian yaitu **“Pengaruh Upah, PDRB, IPM, dan COVID-19 terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2016-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat dari latar belakang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi upah, PDRB, IPM, dan Covid-19 di Pulau Jawa Tahun 2016-2023?
2. Bagaimana pengaruh upah, PDRB, IPM, dan Covid-19 secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa Tahun 2016-2023?
3. Bagaimana pengaruh upah, PDRB, IPM, dan Covid-19 secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa Tahun 2016-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi upah, PDRB, IPM, dan Covid-19 di Pulau Jawa Tahun 2016-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah, PDRB, IPM, dan Covid-19 secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa Tahun 2016-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah, PDRB, IPM dan Covid-19 secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa Tahun 2016-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun empiris.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga bagi pembaca. Penelitian ini dapat membantu untuk mengidentifikasi pengaruh upah, PDRB, IPM, dan Covid-19 terhadap penyerapan tenaga kerja, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan dan pemahaman konsep baru yaitu Covid-19 sebagai novelty dalam penelitian ini yang dianggap sebagai faktor eksogen yang bersifat disruptif terhadap dinamika pasar tenaga kerja.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Merupakan sarana untuk penambahan wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, serta untuk melengkapi salah satu syarat

akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu ekonomi pada Universitas Siliwangi.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi bagi lingkungan civitas akademika khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi pemerintah daerah Pulau Jawa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan referensi dalam menyusun penelitian selanjutnya yang relevan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa meliputi enam Provinsi yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, BPS Banten, BPS DKI Jakarta, BPS Jawa Barat, BPS Jawa Tengah, BPS DI Yogyakarta, BPS Jawa Timur, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

[illegible]